

PERANCANGAN DESAIN FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN ELEKTRONIK PASIEN RAWAT INAP DI UPTD PUSKESMAS TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK

Deni Luvi Jayanto ¹, Muhammad Mutafanninun ², Nurhadi ³, Risa Helilintar ⁴

^{1,2,3} Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, Indonesia

⁴Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

(Email : deni.luvi@iik.ac.id¹, mutafanninun10@gmail.com², nurhadi@iik.ac.id³,
risa.helilintar@gmail.com⁴)

ABSTRAK

Dokter di UPTD Puskesmas Tanjunganom diwajibkan selalu menggunakan formulir persetujuan tindakan kedokteran sebelum melakukan tindakan medis. Berdasarkan temuan, implementasi formulir persetujuan tindakan kedokteran di UPTD Puskesmas Tanjunganom sulit dibaca dan penulisan belum sesuai dengan aturan pendokumentasian rekam medis. Padahal persetujuan tindakan kedokteran sebagai alat bukti legalitas di pengadilan serta menghindari tindakan *malpraktik* yang merugikan pasien. Tujuan penelitian adalah membuat rancangan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik sesuai kebutuhan petugas, berdasarkan *colour*, *layout* dan *control*. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, untuk populasi dan sampel 2 petugas pendaftaran pasien rawat inap yang menggunakan *informed consent*. Hasil penelitian ini adalah desain *interface* formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik. Hasil wawancara kepada 2 petugas pendaftaran pasien rawat inap didapatkan *colour* menggunakan warna hijau muda sebagai simbol warna dari Puskesmas Tanjunganom, *layout* ditata rapi disesuaikan dengan kenyamanan petugas saat menggunakan aplikasi tersebut, serta *control* yang digunakan yaitu *icon* dan teks penjas disesuaikan dengan fungsinya agar penggunaan tombol mudah dipahami. Hasil tersebut disesuaikan dengan kebutuhan petugas guna mempermudah petugas dalam mengoperasikan aplikasi. Sebaiknya bisa segera direalisasikan dengan penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi terhadap petugas agar pelayanan lebih efektif dan efisien. Kesimpulan penelitian ini adalah menghasilkan desain perancangan formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik dengan menggunakan sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran.

Kata kunci: *colour*, *control*, puskesmas, *informed consent*, *layout*.

ABSTRACT

Doctors at the Tanjunganom Health Center UPTD use a medical action approval form before taking medical action. Based on the findings, the implementation of the medical action approval form at the Tanjunganom Health Center UPTD was difficult to read and the writing was not in accordance with the rules for documenting medical records. Whereas approval of medical action as evidence of legality in court and avoiding malpractice actions that harm patients. The purpose of the study was to design an electronic medical action approval form according to the needed of the officer, based on color, layout and control. This study used a qualitative descriptive, for the population and a sample of 2 inpatient registration officers who use informed consent. The result of this research is the interface design of the electronic medical action consent form. The results of interviews with 2 inpatient registration officers obtained that the colour uses light green as a colour symbol from the Tanjunganom Health Center, the layout was neatly arranged according to the comfort of the officers when using the application, and the controls used are icons and explanatory text adjusted to their functions so that the use of buttons was easy. understood. These results are adjusted to the needed of officers to make it easier for officers to operate the application. It should be realized immediately by organizing training, outreach to officers so that services are more effective and efficient.

Keywords: *color*, *control*, health center, *informed consent*, *layout*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan diperlukan sebagai upaya dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang baik untuk individu maupun masyarakat secara optimal. Pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut terdapat interaksi antara pasien dengan tenaga kesehatan dan juga sarana kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan unit pelaksana teknis bidang kesehatan untuk penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa, dalam mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat.

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) Menurut Kemenkes No. 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas merupakan suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Keberadaan SIMPUS terkomputerisasi, akan sangat membantu petugas dalam menyajikan informasi secara cepat, tepat dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang disajikan puskesmas dapat digunakan

untuk pengambilan keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan serta berbagai jenis manajemen kesehatan dan di dalam SIMPUS terdapat penginputan data rekam medis pada unit rekam medis.

Unit Rekam Medis mempunyai tugas sebagai penyelenggara pencatatan, identifikasi pasien dan pelaporan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, serta upaya yang professional, salah satunya adalah terselenggaranya rekam medis yang sesuai dengan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008, yaitu rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Menurut penelitian Prahesti (2021) pentingnya *informed consent* yaitu *informed consent* harus diisi lengkap dan jelas oleh pasien atau keluarga dan kelengkapan *informed consent* sangat penting bagi pelaksana pelayanan kesehatan, sebab dari *informed consent* lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan, adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan kesehatan

Berdasarkan survei awal penelitian yang telah dilakukan, bahwa di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada desain formulir *informed consent* masih belum menggunakan formulir *informed consent* elektronik. Selain itu, dalam penggunaan formulir tersebut masih terjadi penulisan yang terkadang sulit dibaca dan

ketidak sesuaian penulisan. Hal tersebut apabila suatu hari nanti dibutuhkan pembuktian untuk legalitas di pengadilan, petugas yang berwenang akan mengalami kesulitan karena pendokumentasiannya kurang baik. akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari sisi puskesmas dan pasien. Hal lainnya, pencatatan informed consent terkadang diabaikan karena terlalu banyaknya pasien pada bagian pendaftaran pasien rawat inap dan hal tersebut akan bertentangan dengan fungsi dari rekam medis sebagai alat *administration* dan *documentation*.

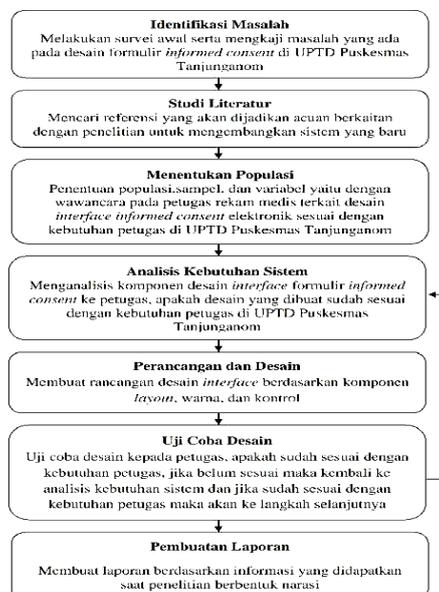
Pentingnya persetujuan tindakan kedokteran sebagai alat bukti hukum, salah satu hak pasien mendapatkan informasi penting dan sejelas-jelasnya yang wajib disampaikan oleh dokter yang menanganinya. Dokter lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan agar pasien terhindar dari tindakan *malpraktik* yang merugikan pasien atas tindakan yang dilakukan oleh dokter. UPTD Puskesmas Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan adanya perancangan desain formulir *informed consent* elektronik guna menunjang pelayanan kesehatan. Dalam penerapan perancangan desain formulir *informed consent* elektronik di Puskesmas diharapkan dapat memberikan kemudahan distribusi serta pendokumentasian sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan dapat mempermudah petugas dalam pengarsipan digital di komputer sehingga tidak menyimpan banyak file.

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui gambaran perancangan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, mengkaji kebutuhan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran

pasien rawat inap di UPTD Puskesmas Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, Menghasilkan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik berdasarkan *colour, layout, dan control* pasien rawat inap.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian unit pendaftaran pasien rawat inap. Populasi 2 petugas pendaftaran rawat inap di UPTD Puskesmas Tanjunganom. Sampel yang digunakan sesuai dengan petugas UPTD Puskesmas Tanjunganom sejumlah 2 petugas pendaftaran rawat inap yang menggunakan *informed consent*. Teknik sampling yang digunakan sampling jenuh dimana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Notoadmojo, 2018). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar wawancara, alat tulis, alat dokumentasi. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.



Gambar 1. Kerangka Kerja

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain formulir persetujuan tindakan kedokteran di puskesmas tanjunganom

Penggunaan *informed consent* di Puskesmas Tanjunganom menggunakan lembar formulir kertas berwarna putih dan dituliskan tangan oleh petugas.

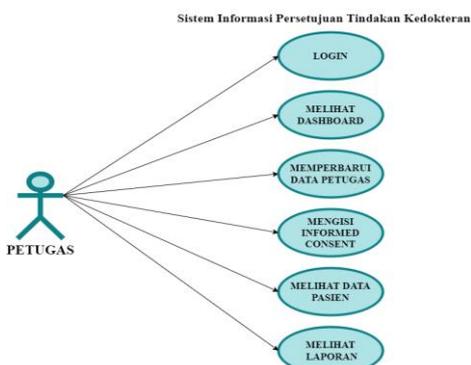


Gambar 2. Tampilan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran puskesmas tanjunganom kertas

B. Gambaran Desain Kebutuhan Petugas Berdasar *Layout, Control, Colour*

Sebelum menggambar desain ke dalam bentuk layout, control dan colour, peneliti mengidentifikasi kebutuhan *Unified Modeling Language (UML)* seperti *use case diagram*, *sequence diagram* dan *class diagram* peneliti menyimpulkan bahwa kebutuhan petugas sebagai berikut:

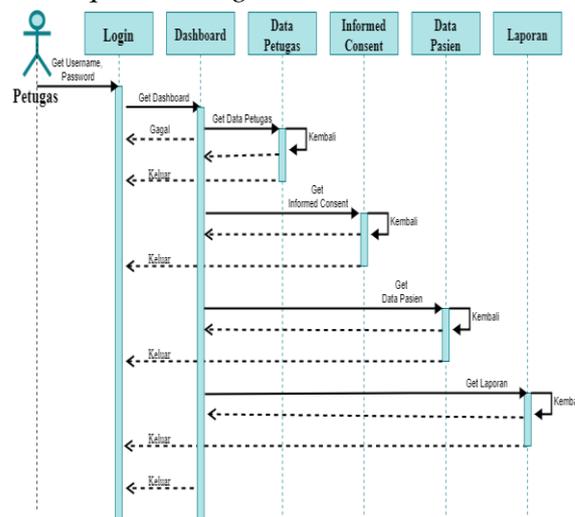
1. Use Case Diagram



Gambar 3. Use case diagram persetujuan tindakan kedokteran

Pada *use case diagram* didapatkan model *use case diagram* dengan mempertimbangkan kebutuhan petugas maka didapatkan bagaimana interaksi yang terjadi pada *actor* (petugas pendaftaran pasien rawat inap) dengan proses yang dapat terjadi dalam sebuah sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran.

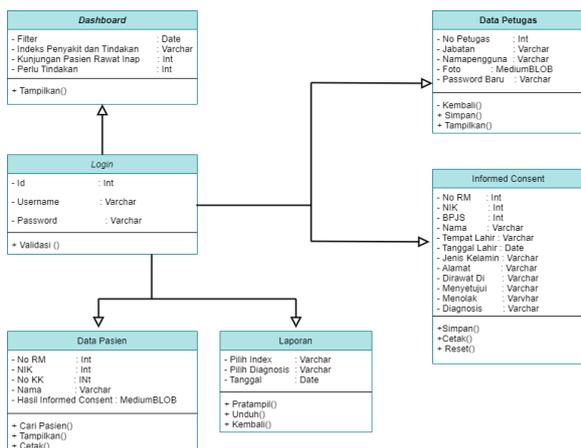
2. Sequence Diagram



Gambar 4. Sequence diagram persetujuan tindakan kedokteran

Pada gambar 4 didapatkan *sequence diagram* untuk menggambarkan interaksi pada sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran. Pertama petugas melakukan *login* dengan *username* dan *password* dan melakukan validasi ke dalam basis data, jika gagal petugas akan kembali ke halaman *login* lagi, jika berhasil maka akan muncul halaman *dashboard*, setelah di halaman *dashboard*, pengguna bisa memilih untuk menggunakan menu data petugas, *informed consent*, pencarian data pasien, dan melihat data laporan pasien.

3. Class Diagram



Gambar 5. Class diagram persetujuan tindakan kedokteran

Pada gambar 5 terdapat beberapa entitas dan setiap entitas memiliki atribut serta data karakter dan data numerik.

Rancangan User Interface Sistem Informasi Persetujuan Tindakan Kedokteran

1. Desain *interface* tampilan awal atau *login* sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran



Gambar 6. Desain *interface* login sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Pada Gambar 6 Desain *interface* login untuk memulai *login* petugas harus memasukkan *username* dan *password* agar dapat masuk dan bisa melanjutkan ke halaman selanjutnya dengan mengakses sesuai hak akses yang dijadikan *username*

dan *password*. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan *username* dan *password* maka petugas tidak dapat melanjutkan ke halaman selanjutnya dan bisa menghubungi IT CP yang tertera dilayar.

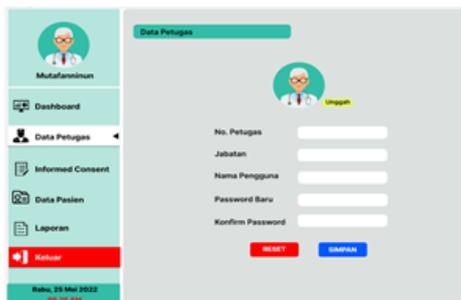
2. Desain *interface* dashboard sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran



Gambar 7. Desain *interface* dashboard sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Pada Gambar 7 Desain *interface* dashboard, setelah bisa *login* kedalam sistem petugas dapat melihat informasi terkait data indeks penyakit dan tindakan yang berobat di Puskesmas Tanjunganom yang bisa di filter dari tanggal yang ditentukan.

3. Desain *interface* data petugas sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran



Gambar 8. Desain *interface* data petugas pada sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Berdasarkan Gambar 8 menjelaskan identitas serta menampilkan admin yang tersimpan pada sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran. Petugas dapat mengganti akun admin serta mengganti foto. Petugas bisa mengganti password lama dengan yang baru memasukkan *password* baru dan mengkonfirmasi ulang di menu konfirmasi *password* baru lalu klik simpan.

4. Desain *interface* formulir persetujuan tindakan kedokteran sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Gambar 9. Desain *interface* formulir persetujuan tindakan kedokteran sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Berdasarkan Gambar 9 menampilkan item yang akan diisi oleh petugas yang isinya yaitu pemberian informasi, persetujuan tindakan serta item autentifikasi pada *informed consent*. Tampilan cari bisa langsung memasukan nomer rekam medis pasien bila mana sudah ada data dari pasien yang dari SIMPUS serta untuk pengisian bisa ada yang secara otomatis dengan sesuai yang terdapat segitiga hitam bisa langsung memilih tanpa menetik secara seluruhnya. selanjutnya ada item untuk menyimpan,

mencetak, serta reset menghapus data yang terisi.

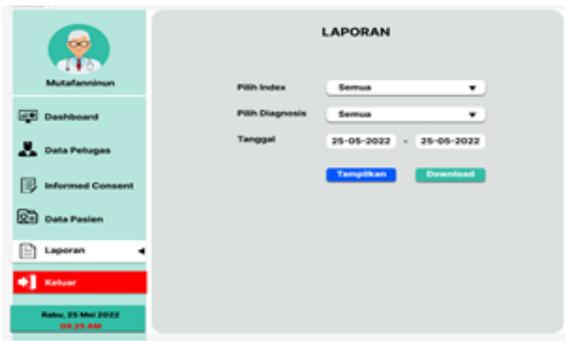
5. Desain *interface* data pasien sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

No. Rekam Medis	NIK	No. KK	Nama
356010	351808xxx	3518086xx	Tn. S
366011	351808xxx	3518061xx	Tn. M
366012	351807xxx	3518072xx	Ny.T
154005	351809xxx	3518084xx	Ny.I
401904	351805xxx	3518053xx	Ny.I
501001	350817xxx	3508171xx	Ny. S
501002	351608xx	3516087xx	Tn. A

Gambar 10. Desain *interface* data pasien sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Berdasarkan Gambar 10 menampilkan data pasien yang sudah tersimpan pada data pasien, petugas dapat mengetahui secara otomatis saat menetik kan salah satu item contoh item NIK atau nama pasien, sehingga akan otomatis keluar data pasien jika sudah terdaftar di UPTD Puskesmas Tanjunganom. Pada tampilan hasil *informed consent* petugas bisa menampilkan hasil tersebut untuk mengecek data sudah benar dan bisa klik cetak untuk hasil dari *output* nya.

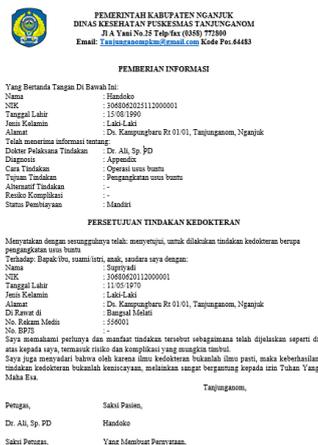
6. Desain *interface* laporan sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran



Gambar 11. Desain *interface* laporan sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran

Berdasarkan Gambar 11 menampilkan laporan formulir yang sudah terekap dan tersimpan, ada pilihan index dan pilihan diagnosis. Serta tanggal yang ingin dicari. Petugas dapat mendownload file tersebut. sehingga dapat mempermudah pencarian serta penyimpanan.

7. Tampilan output desain formulir persetujuan tindakan kedokteran



Gambar 12. Tampilan *output* desain formulir persetujuan tindakan kedokteran

Berdasarkan Gambar 12 tampilan dari *output* desain formulir persetujuan tindakan kedokteran yang sudah di cetak menjadi kertas isi meliputi, pemberian informasi terkait identitas yang bertanggung jawab, diagnosis serta dalam persetujuan tindakan

kedokteran berisi identitas pasien, serta persetujuan tindakan dengan tampilan seperti gambar diatas.

PEMBAHASAN

A. Kajian desain formulir persetujuan tindakan kedokteran pada rawat inap di UPTD Puskesmas Tanjunganom

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan desain formulir persetujuan tindakan kedokteran di UPTD Puskesmas Tanjunganom masih menggunakan manual atau kertas, pencatatan secara langsung dari awal sampai akhir komponen formulir. Menurut Handiwidjojo (2009) tentang sistem rekam medis elektronik dalam penerapan perangkat teknologi informasi untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan serta melakukan akses data yang tersimpan dalam sistem manajemen basis data meliputi sumber data medis.

Pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran di Puskesmas Tanjunganom masih didapati adanya tulisan yang sulit dibaca dan penulisan yang belum sesuai dengan aturan pendokumentasian rekam medis. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 32 tentang Rumah Sakit mengenai “hak pasien bahwa pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan”. Hal penting diterapkannya pemberian informasi yang lengkap dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran sebagai alat bukti hukum, pembuktian legalitas di pengadilan serta menghindari tindakan malpraktik yang merugikan pasien.

B. Hasil Desain Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran Elektronik

Pada pembuatan desain *interface* yang sudah digambarkan pada bagian hasil sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas saat wawancara survei awal dan wawancara pengujian desain *interface* dan kebutuhan sistem, sudah dilakukan kroscek bahwa sudah sesuai dengan desain yang akan dibuat. Menurut penelitian Fahmi (2016) menjelaskan bahwa pembuatan desain *interface* berdasarkan *colour*, *layout* dan *control* mengenai bentukan objek tampilan sangat penting dengan tujuan penggunaan desain *interface* adalah untuk membuat interaksi pengguna lebih sederhana, menarik dan sebaik mungkin. Sehingga pemilihan kombinasi *colour*, *layout*, dan *control* pada perancangan sangat diperhatikan karena peneliti ingin membuat interaksi antara pengguna/petugas rekam medis dengan sistem informasi lebih intens, hal ini akan membuat pengguna lebih senang dan mudah mengoprasikannya.

1. Colour

Berdasarkan penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada ke dua petugas pendaftaran pasien rawat inap dalam penggunaan warna, berdasarkan warna yang tidak mencolok dan tetap bisa membuat petugas lebih tenang, nyaman untuk menggunakannya. Menurut penelitian Ghiffary (2018) dari salah satu komponen penting yaitu warna, yang menyusun sebuah sistem karena warna akan tampak pada seluruh tampilan di sistem tersebut. Hasil uji coba desain dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas, sehingga peneliti menggunakan warna dasar hijau muda dalam desain *interface* sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran, warna ini diambil dari

dasar warna puskesmas. Penggunaan warna dasar hijau muda disesuaikan dengan kebutuhan petugas agar nyaman menggunakan aplikasi serta dapat meningkatkan produktifitas kerja petugas rekam medis serta bisa membuat pelayanan agar lebih cepat dan akreditasi Puskesmas bisa meningkat.

2. Layout

Berdasarkan penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada ke dua petugas pendaftaran pasien rawat inap dalam penggunaan *layout*/tata letak harus rapi, sederhana dan mudah dipahami. Menurut penelitian Fahmi (2016) menjelaskan bahwa pembuatan *interface* terutama *form fill-in*/pemilihan formulir atau isian berdasarkan tata letak dan *direct manipulation*/penggambaran visual mengenai bentukan objek tampilan sangat penting dengan tujuan penggunaan desain *interface* adalah untuk membuat interaksi pengguna menjadi lebih sederhana, menarik dan sebaik mungkin. Pemilihan *layout* pada perancangan sangat diperhatikan karena peneliti ingin membuat interaksi antara pengguna/petugas rekam medis dengan sistem informasi lebih intens, dan pengguna selalu tertarik dengan sistem informasi. Kesesuaian *layout* yang dibuat oleh peneliti juga sudah didukung oleh pengguna saat sistem informasi diujikan dan dilakukan wawancara. Peneliti menggunakan komponen *metrics & keylines* agar jarak dan tata letak terlihat jelas sesuai dengan kebutuhan petugas guna kenyamanan petugas dalam menggunakan sistem informasi tersebut.

3. Control

Hasil penelitian yang didapat dengan melakukan wawancara kepada ke dua petugas pendaftaran pasien rawat inap dalam penggunaan kontrol harus sesuai

dengan fungsinya dan mudah dipahami. Menurut penelitian Schlatter (2013) menyatakan komponen kontrol merupakan perihwal yang penting karena kontrol merupakan elemen dari antarmuka pengguna yang dapat digunakan orang untuk berinteraksi dengan sistem melalui sebuah layar. Peneliti membuat tampilan kontrol dalam desain *interface* dengan tampilan hasil sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas dan kedua petugas menyatakan sudah sesuai dengan yang kedua petugas inginkan. Kesesuaian ikon sudah sesuai dengan kebutuhan petugas, sehingga peletakan ikon yang ada, petugas sudah mengerti maksud dari kegunaan tombol dan penamaan bagian-bagiannya termasuk isian formulir. Nantinya diharapkan petugas pendaftaran pasien rawat inap dimudahkan dengan pengidentifikasian kontrol, sehingga petugas rekam medis lebih menguasai fungsi sistem informasi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu saat bekerja karena fungsinya mudah dikenali.

4. *Output* Persetujuan Tindakan Kedokteran

Desain formulir persetujuan tindakan kedokteran yang sudah ada di UPTD Puskesmas Tanjunganom dengan desain *interface* sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran berdasarkan penilaian kesesuaian komponen yang meliputi identifikasi, pemberian informasi, persetujuan Tindakan dan autentifikasi. Menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa “Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung”. Kesesuaian komponen identifikasi sudah

sesuai dengan kebutuhan desain *interface* sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran, informasi yang tercantum pada komponen desain *interface* sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran bahwa informasi sudah sesuai dalam pengisian komponen desain.

4. KESIMPULAN

Formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ada di UPTD Puskesmas Tanjunganom sudah terlaksana, dalam formulir disesuaikan peneliti dengan kebutuhan petugas serta sesuai dengan Konsil Kedokteran Indonesia.

Desain *interface* formulir persetujuan tindakan kedokteran elektronik sudah dibuat perancangannya berdasarkan analisis kebutuhan sistem menggunakan UML meliputi *usecase*, *sequence* dan *class diagram* dengan mempertimbangkan penggunaan *colour*, *layout* dan *control* sudah disesuaikan dengan kebutuhan petugas sehingga petugas mudah dalam mengoperasikan sistem informasi persetujuan tindakan kedokteran.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ansyori, A. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit. *Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti*, 7(2).
- Bungin, B. 2014. *Metodologi Penelitian (Cetakan VIII)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Ghiffhary, M.N.E., T.D.S., & Herdiyanti, Anisa. 2018. Analisa Komponen Desain *Layout*, Warna, Dan Kontrol Pada Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Berdasarkan Kemudahan

- Penggunaan. Jurnal Teknik ITS, Volume 7 Nomor 1. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.2940>
- Ghiffary, M. N. El, Susanto, T. D., & Prabowo, A. H. 2018. Analisis Komponen Desain *Layout*, Warna, dan Kontrol pada Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Berdasarkan Kemudahan Penggunaan (Studi Kasus: Aplikasi Olride). Jurnal Teknik ITS.
- Hakam, Fahmi. 2016. Analisis, Perancangan Dan Evaluasi Sistem Informasi Kesehatan. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Handiwidjojo, W. 2009 tentang sistem rekam medis elektronik. Jurnal EKSIS Vol 02 No 01 Mei 2009: halaman 36-41, ISSN: 2549-1903.
- Huffman E.K. 1994. *Health Information Management*. United States of America: Physicians Record Company Berwin.Illnois.
- Ikawati, F. R. (2021). *Buku ajar konsep dasar rekam medis informasi kesehatan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Ikawati, F. R., Ansyori, A., & Priskusanti, R. D. (2021). Tinjauan literatur analisis faktor penyebab keterlambatan penyediaan rekam medis rumah sakit di Indonesia. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia, 1(1), 30-38
- Ikawati, F. R., Rusdi, A. J. (2021). Evaluation analysis of using tracer on medical record storage. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(4), 9282-9288 DOI:
- J. Guwandi. 2003. *Informed consent dan Informasi Refusal*. Jakarta: Fakultas Kedokteran UI
- Kementerian Kesehatan No.560/Menkes/SK/IV/2003 Tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Inap. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.a
- Kementerian kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 Sistem Informasi Puskesmas. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Martha, E., Kresno, S. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Meyyulinar, H. 2019. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaklengkapan *Informed consent* Pada Kasus Bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak. Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI), 3.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Notoatmodjo, soekidjo. 2012. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmojo, soekidjo. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan (Cetakan II). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15/KKI/PER/VIII/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dan Majelis

- Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsi. Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Menteri kesehatan republik indonesia. Jakarta
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. 2016. Menteri kesehatan republik indonesia. Jakarta.
- Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Menteri kesehatan republik indonesia. Jakarta.
- Prabowo, A., Heriyanto, S. 2013. Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Volume 2 nomor 2.
- Prahesti, R. 2021. Pemberian Informasi dan Kelengkapan Pengisian *Informed consent* Pada Pasien *Sectio Caesarea* Di RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta *Information Disclosure and the Completeness of Informed consent for Caesarean Section Patients at PKU Muhammadiyah Gamping*. 4(1), 1–7.
- Rudjiono Daniel. 2020. Pengembangan Desain Website Sebagai Media Informasi dan Promosi (Studi Kasus : PT. Nada Surya Tunggal Kecamatan Pringapus). Jurnal Ilmiah Komputer Grafis, 13(2), 56–66.
- Rusdi, A. J. Ohoiwutun, Y. T. (2019). Analisis Yuridis Manajemen Kerahasiaan Visum Et Repertum Tindak Pidana Kesusilaan di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso. *Multidisciplinary Journal*, 2(1), 8-11.
- Sudra, Rano Indradi, 2017. Rekam Medis. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 46 Ayat (1) Tentang Praktik Kedokteran. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang meliputi Diagnosis dan Tata Cara Tindakan Medis. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.